

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid Attamini, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, 25 April 1992.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Enny Agustina, *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara (Permasalahan, Penyelesaian Hingga Analisa Kasus)*, PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- H.A Syamsul Muljayat, *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cv. Adanu Abitama, 2023.
- Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik Perda Partisipatif*, Cet. 1, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2016.
- Mulhayat, Ha Syamsul, Mh Sh, And Penerbit Adab. *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Adab, 2023.
- Salim, Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.
- Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Setara Press, Malang, 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Sudikmo mertokusomo. *Penemuan hukum*. Liberty, Yogyakarta. 1996.

Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.

Sudi, Moch. *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Uud 1945*. Rasibook, 2016.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1985.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

B. Jurnal

Agusta, Elbert, and Imanuel Jaya. *Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kualitas Kinerja Yang Lebih Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan 6.1 (2017).

Ahmad Ansori, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Dalam Memelihara Hutan’, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Mataram, Volume 2 Nomor 1, Januari 2016.

Achmad Sudrajad , Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perancang Peraturan Perundang-Undangan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara ,Jakarta, Edisi 2022, hlm. 20.Ashari, Edy Topo. *Reformasi Pengelolaan SDM Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi Yang Baik*. Jurnal Borneo Administrator, 2010;

Achmad Rofiq Jati Usodo, Lailatul Maulidfia, Aldias Sutan Mudo Akbar Farobi Zufarlahi, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pelanggaran Disiplin Oleh Aparatur Sipil Negara, “*Jurnal Hukum Dan Hukum Islam, Volume 10. No. 2*” Juni, 2023;

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang*

Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan. 2011.

Arif Efendy, Kajian Hukuman Disiplin Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "*Jurnal Widiya Praja, Vol. 2 No. 1*", 2022;

Dewi, Serafina Shinta. *Pengaturan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS*. Wicarana 1.2 (2022).

Faried, Achmad. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 (Studi Kajian Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019)*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

Indrawan P, M. Herry. *Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Upaya Pembentukan Aparatur yang bersih dan berwibawa*. Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.

Kristiawan, Stevanus Eka. *Tinjauan Yuridis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Memasuki Batas Usia Pensiun Dan Sedang Menjalani Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Uns (Sebelas Maret University), 2023.

Nugroho Wahyu, *Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 3.

Nurhafni, Popy. *Tinjauan Yuridis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin (Studi Penelitian Pada Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kota Tebing Tinggi)*. Diss. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.

Noor Ramadhan, Aulia. *Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Ag/2012tentang Sengketa Kewenangan Mengadili Dan Pembatalan Akta Hibah Dalam Prespektif Kepastian Hukum*. Diss. University Of Muhammadiyah Malang, 2019.

- Puspita, Rona. *Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan Publik*. Dharmasiswa” Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1.2 (2021).
- Prista Alisa Ramadhani dan Tundjung Herning Sitabuana, *Prinsip Dasar Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil, “Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat”*, Jakarta, 2021;
- Rauzi, Fathur. "Penjatuhan Hukuman Terkait Masalah Disiplin Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Fundamental Justice* (2023): 112-127.
- Ricky Risnanda Surbakti Dan Nursariani Simatupang, *Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi Asn Yang Melakukan Tindak Pidana, “Jurnal Edu Yustisia : Edukasi Hukum”*, 2020.
- Sari, Aswinda Nilam, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Vica Jillyan Edsti Saija. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas*. Capitan:Constitutional Law & Administrative Law Review 1.2 (2023).
- Subekti, Imam, and Sulhan Sulhan. *law oblique terhadap aparatur sipil negar (asn) yang melanggar hukum dalam menciptakan good governance*. Jurnal Ilmiah Metadata 5.1 (2023).
- Surbakti, Ricky Risnanda, And Nursariani Simatupang. "Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi Asn Yang Melakukan Tindak Pidana." *Eduyustisia* 1.1 (2022): 36-46.
- Susilawati, Susilawati (2021) *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Terpidana Korupsi Di Kabupaten Kampar*. Masters Thesis, Universitas Islam Riau.
- Zamasi, Seriawati. *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara*. (2020).

C. Peraturan Perundang Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;

_____, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*;

_____, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi

Peraturan Bupati kerinci Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

D. Website

Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Aspek Yuridis Penjatuhan Hukuman Disiplin Pns Yang Berimplikasi Pada Pemberhentian Gaji Pns
https://sulsel.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2019/01/a._Aspek_Yuridis_Penjatuhan_Hukdis_PNS_yg_Berimplikasi_pada_Pemberhentian_Gaji_-_edit.pdf diakses pada Tanggal 8 Juli 2024;

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tahun 2020, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20200226-060425-8543.pdf>, diakses pada tanggal 7 juli 2024;

Biro sumber daya manusia dan organisasi kementerian perhubungan, Point Penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS,

<https://birosdm.dephub.go.id/post/read/disiplin?language=en>, diakses
pada tanggal 6 juli 2024.